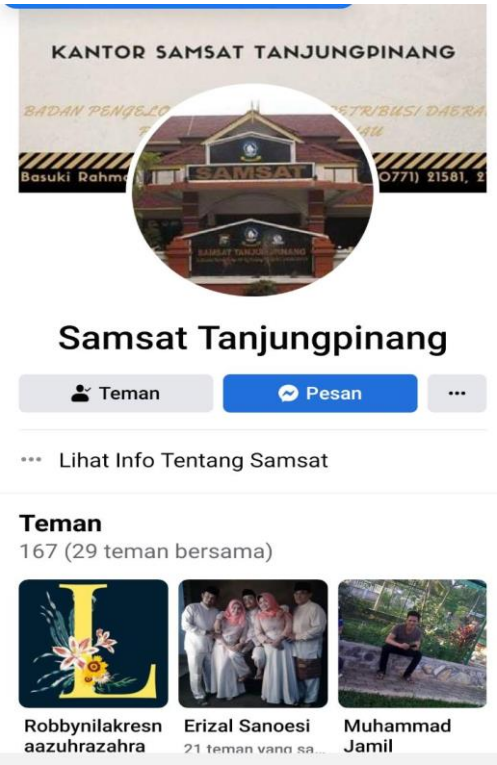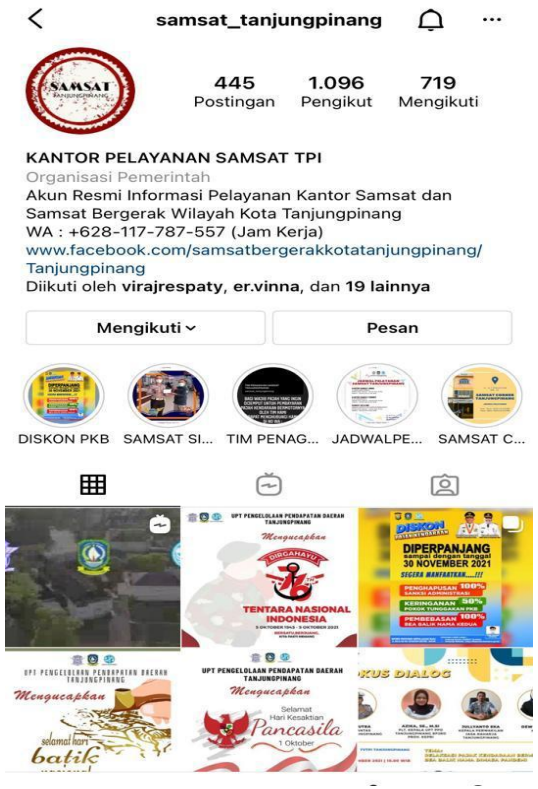2.3. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK